

ETIKA MANAJEMEN DAN AKUNTAN UNTUK PERWUJUDAN WILAYAH BEBAS KORUPSI DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KEDIRI

Mariana Puspa Dewi ¹⁾, Mulyaningtyas²⁾
Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang ^{1), 2)}
Email: mariana@asia.ac.id¹⁾, mulyaningtyas@asia.ac.id²⁾

Abstrak

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dikemas dalam bentuk workshop mengenai Etika Manajemen Dan Akuntan Untuk Perwujudan Wilayah Bebas Korupsi Di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kediri. Aparatur Sipil negara (ASN) diharapkan dapat memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil, serta tidak diskriminatif. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat, berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas. Dalam rangka mewujudkan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di BPN Kediri maka perlu dilakukan workshop ini sebagai persiapan satker yang akan diusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) guna mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Tujuan utama pembangunan Zona Integrasi menuju WBK/WBBM adalah untuk pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam implementasinya adalah dengan senantiasa meningkatkan akuntabilitas kinerja, menyusun kontrak kinerja dengan lebih baik dan mengadakan penyuluhan tentang anti gratifikasi dan penanggulangan korupsi.

Kata kunci: Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kantor Pertanahan, Wilayah Bebas Korupsi (WBK), Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

ETHICS OF MANAGEMENT AND ACCOUNTING FOR THE ESTABLISHMENT OF A CORRUPTION-FREE AREA IN THE NATIONAL LAND AGENCY (BPN) KEDIRI

Abstract

This Community Service activity is packaged in the form of a workshop on Management Ethics and Accountants for the Realization of a Corruption-Free Area in the National Land Agency (BPN) of Kediri. The State Civil Apparatus (ASN) is expected to be able to provide services with empathy, respect and courtesy, without any strings attached and without elements of coercion. Provide services in a fast, precise, open, and fair manner, as well as non-discriminatory. Responding to the condition of the community environment, oriented to improving the welfare of the community in carrying out their duties. In order to realize the Corruption-Free Regional Integrity Zone (WBK) and the Clean Serving Bureaucratic Area (WBBM) at BPN Kediri, it is necessary to conduct this workshop as a preparation for the work unit which will be proposed to the Ministry of Administrative Reform and Bureaucratic Reform (KemenPANRB) in order to get the title of Corruption-Free Area. (WBK) or the Clean Serving Bureaucratic Area (WBBM). The main objective of the development of the Integration Zone towards WBK/WBBM is to prevent corruption, collusion and nepotism and to improve the quality of public services. In its implementation, it is by continuously improving performance accountability, compiling better performance contracts and conducting counseling on anti-gratification and overcoming corruption.

Keywords: National Land Agency (BPN), Land Office, Corruption-free Area (WBK), Clean Bureaucratic Service Area (WBBM)

A. PENDAHULUAN

Aparatur Sipil negara (ASN) diharapkan dapat memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil, serta tidak diskriminatif. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat, berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Dalam rangka mewujudkan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di BPN Kediri maka perlu dilakukan workshop ini sebagai persiapan satker yang akan diusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) guna mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Tujuan utama pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM adalah untuk pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam implementasinya adalah dengan senantiasa meningkatkan akuntabilitas kinerja, menyusun kontrak kinerja dengan lebih baik dan mengadakan penyuluhan tentang anti gratifikasi dan penanggulangan korupsi.

Pembangunan Zona Integritas memang tidak terlepas dari dukungan dari seluruh satker yang berada di Kementerian ATR/BPN. Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengembangan dan Pengawasan Zona Integritas. Peran pimpinan satker sangat penting karena akan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). Penilaian IKU seorang Kakanwil BPN akan dinilai dari berapa banyak satker yang sudah membangun Zona Integritas dibandingkan satker yang ada. Nantinya IKU ini tidak atas dasar berapa satker yang diusulkan tetapi IKU nanti akan dipecah menjadi dua tahap, yaitu IKU di semester I hingga penilaian TPI dan berikutnya IKU di semester II, aspek yang dinilai adalah satker yang lulus penilaian TPI, lulus penilaian KemenPANRB, kemudian lulus WBK/WBBM.

Sebagai informasi, pembangunan Zona Integritas di Kementerian ATR/BPN sudah dimulai sejak tahun 2016 dan saat ini terdapat 21 satker di Kementerian ATR/BPN yang memiliki predikat WBK dan 1 satker dengan predikat WBBM.

Permasalahan klien dari BPN Kediri ini adalah belum siap dalam melaksanakan WBM dan WBBK sehingga diharapkan seminar ini dapat membantu menggugah kesadaran dan meningkatkan persiapan dalam mewujudkan Zona Integritas dalam rangka menuju WBM dan WBBK.

Tim pengabdian kami memberikan solusi, yaitu membantu memberikan informasi terkait penerapan WBK dan WBBM pada BPN Kediri. Solusi berikutnya adalah berperan sebagai tim konsultan yang dapat diajak berdiskusi dan pendampingan (opsional) dalam persiapan dokumen terkait Zona Integritas. IKU nanti akan dipecah menjadi dua tahap, yaitu IKU di semester I hingga penilaian TPI dan berikutnya IKU di semester II, aspek yang dinilai adalah satker yang lulus penilaian

TPI, lulus penilaian KemenPANRB, kemudian lulus WBK/WBBM.

Sebagai informasi, pembangunan Zona Integritas di Kementerian ATR/BPN sudah dimulai sejak tahun 2016 dan saat ini terdapat 21 satker di Kementerian ATR/BPN yang memiliki predikat WBK dan 1 satker dengan predikat WBBM.

Permasalahan klien dari BPN Kediri ini adalah belum siap dalam melaksanakan WBM dan WBBK sehingga diharapkan seminar ini dapat membantu menggugah kesadaran dan meningkatkan persiapan dalam mewujudkan Zona Integritas dalam rangka menuju WBM dan WBBK.

Korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruption* berasal dari kata *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption, corrupt*; Perancis yaitu *corruption*; dan Belanda yaitu *corruptie, korruptie*. Dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia yaitu korupsi.

Beberapa pengertian korup dan korupsi dari berbagai kamus:

1. Korup berarti:

- a. Busuk; palsu; suap (Depdikbud, 1993)
- b. Buruk; rusak; suka menerima uang sogok; menyelewengkan uang/barang milik perusahaan atau negara; menerima uang dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi (Sudarsono, 2002)

2. Korupsi berarti:

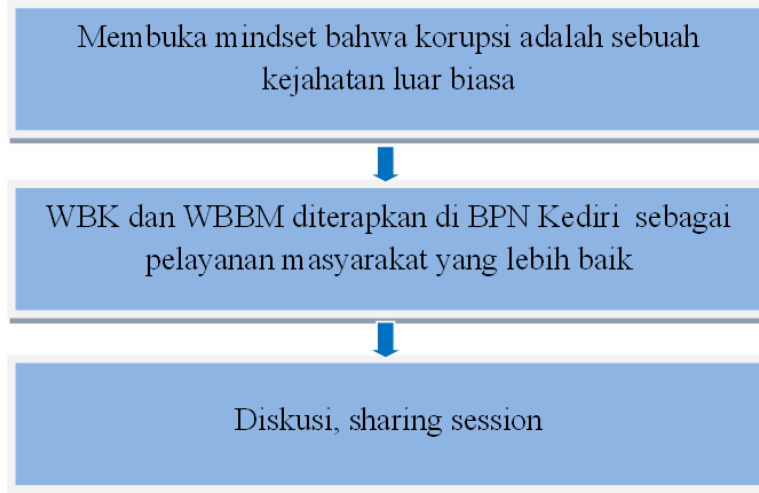
- a. Kebejatan; ketidakjujuran; tidak bermoral; penyimpangan dari kesucian (*The Lexicon Webster Dictionary, 1978*)
- b. Penyuapan pemalsuan (*Kamus Bahasa Indonesia, 1993*)
- c. Penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain (*Kamus Hukum, 2002*)

Kartono (2003) memberi batasan korupsi sebagai tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, dan atau merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan- kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri. Dengan pernyataan lain korupsi adalah adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak saudara, dan teman.

Suwartodjo (1997) menyatakan bahwa korupsi ialah tingkah laku atau tindakan seseorang atau lebih yang melanggar norma-norma yang berlaku dengan menggunakan dan/atau menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan melalui proses pengadaan,

penetapan pungutan penerimaan atau pemberian fasilitas atau jasa lainnya yang dilakukan pada kegiatan penerimaan dan/atau pengeluaran uang atau kekayaan, penyimpanan uang atau kekayaan serta dalam perizinan dan/atau jasa lainnya dengan tujuan keuntungan pribadi atau golongannya sehingga langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan dan/atau keuangan negara/masyarakat.

B. METODE PELAKSANAAN



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Program Pengabdian yang Diusulkan

1. Kegiatan dan Pelaksanaan

Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan secara mandiri oleh Tim Pengabdian Masyarakat Institut teknologi dan Bisnis Asia Malang. Pelatihan diberikan oleh tim pemateri Pengabdian kepada Masyarakat tentang Etika Manajemen dan Akuntan Untuk perwujudan Wilayah Bebas Korupsi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kediri.

Tabel 1.
Materi dan Narasumber

Sesi I	Korupsi Adalah Kejahatan Luar Biasa	Bu Mulyaningtyas, SE., M.Ak
Sesi II	Penerapan WBK dan WBBM di Wilayah Kantor BPN Kediri	Bu Mariana Puspa Dewi, SE., M.Ikom
Sesi III	Diskusi dan Sharing session	Bu Justita Dura, SE., M.Ak Bu Fadilla Cahyaningtyas, SE., MSA, Ak, CA, Pak Rifki Hanif SE., MM

2. Waktu dan Tempat Pengabdian kepada masyarakat

Pelaksanaan kegiatan dan waktu pelaksanaan kegiatan dilakukan bertempat di Aula Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kediri, Hari Kamis, 21 Oktober 2021 dari jam 09.00-16.00.

3. Mitra/Subjek Pengabdian

Workshop diikuti oleh kurang lebih 70 orang peserta yang terdiri dari Kabag, Kasi dan Staf. Suasana berlangsung tertib, komunikasi berlangsung dua arah, peserta antusias utamanya di sesi diskusi dan sharing.

4. Prosedur

Dalam pengabdian ini, lebih diutamakan adanya komunikasi dua arah dan mini test mengenai pemahaman mereka terhadap WBM atau WBBK. Diskusi dan sharing session berlangsung dengan baik, meskipun ada sedikit rasa sungkan mengingat ada Kabag dan Kasi yang mengikuti sesi workshop ini. Namun berkat adanya komunikasi yang baik, peserta berani menyampaikan pendapat dan bertanya, bahkan ada beberapa peserta yang mengatakan bahwa sesi diskusi sebaiknya sering-sering dilakukan karena bisa dianggap sebagai sesi curhat yang membuat uneg-uneg dalam pekerjaan tersalurkan dengan baik dan memperoleh solusi.

Workshop diikuti oleh kurang lebih 70 orang peserta yang terdiri dari Kabag, Kasi dan Staf. Suasana berlangsung tertib, komunikasi berlangsung dua arah, peserta antusias utamanya di sesi diskusi dan sharing.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang diperoleh adalah kemampuan peserta dalam menerapkan WBK dan WBBM dalam wilayah Badan Pertanahan Nasional Kediri, sebagai peningkatan dan penyempurnaan pelayanan kepada masyarakat di sektor agraria. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa seluruh pimpinan dan staf BPN Kediri sangat antusias dalam mengikuti setiap sesi kegiatan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya interaksi yang sangat baik dalam menanggapi penyampaian materi.

Berdasarkan ketertarikan dan minat yang tinggi yang ditunjukkan oleh BPN Kediri, maka tim pelaksana pengabdian berencana untuk mengadakan workshop lagi dengan pokok bahasan yang lain yaitu Pengelolaan dan Implementasi Manajemen Risiko di Wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri di tahun 2022.

Tabel 2.
Hasil Evaluasi yang Diajukan

No	Evaluasi	Indikator	Bobot
1	<p>Peserta mengatualisasikan nilai-nilai integritas dengan menjawab beberapa pertanyaan mengenai materi korupsi, WBK, dan WBBM sesuai dengan pekerjaannya. Beberapa pertanyaan adala sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tuliskan nilai-nilai yang diyakini dan dianut yang berubungan dengan pemberantasan korupsi berikut indikatornya. 2. Pernahkah anda melakukan pelanggaran atas nilai-nilai integritas yang diyakini dan dianut dan/atau kode etik organisasi/lembaga? 3. Apakah anda mengakui pelanggaran tersebut? Jika ya, mengapa dan kepada siapa anda menceritakan pengakuan tersebut? 4. Upaya apa yang dilakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut? 5. Apa yang anda lakukan jika ada orang lain yang berperilaku tidak sesuai dengan nilai-nilai 	<p>Sesi tanya jawab yang menghasilkan problem solving lebih dari sebelumnya</p> <p>Keberanian dalam mengungkapkan ide, gagasan, sasaran, maupun pertanyaan. Kemampuan dan keberanian dalam berbicara di depan publik</p>	<p>50%</p> <p>50%</p>

D. SIMPULAN

1. Dari kegiatan pengabdian masyarakat di bidang penyampaian materi hasilnya cukup baik dan dapat diterima sebagai dukungan untuk mewujudkan WBK dan WBBM di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kediri untuk pelayanan yang lebih baik.
2. Dari kegiatan ini di sesi diskusi dan sharing session perlu dilakukan lebih banyak sesi feed back dan lebih membangun komunikasi dua arah karena sebagian besar pegawai sungkan menyampaikan permasalahan yang dihadapi karena ada pimpinan di dalam sesi ini.

E. SARAN

1. Kegiatan ini dapat dilangsungkan di instansi pemerintah yang lain.
2. Dapat dilakukan pengabdian lebih lanjut dengan materi lanjutan atau materi berbeda.

F. DAFTAR PUSTAKA

Depdikbud. (1993). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Juniadi Suwartodjo. (1997). *Korupsi Pola Kegiatan dan Penindakannya Serta Peran Pengawasannya dalam Penanggulangannya*. Jakarta: Balai Pustaka.

Kartini Kartono. (2003). *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Press.

Sudarsono. (2002). *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta

The Lexicon Webster International Dictionary of The English Language: The English Language Institut of America, Inc, 1978.